ABDIMAS Iqtishadia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekonomi Syariah dan Multidisiplin Ilmu
Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Pamulang
e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

Transformasi Digital Perbankan Syariah : Peluang dan Tantangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun)

Nufzatutsaniah[1)], Nurismalatri[2)],Irham Fachreza Anas[3)]

Universitas Pamulang

[1)]dosen01011@unpam.ac.id, [2)] dosen00996@unpam.ac.id[3)] dosen 01611@unpam.ac.id

artikel di submit 6 Mei 2026 direvisi 22 Mei 2026 dan diterima 30 Juni 2026

Abstrak

Transformasi digital perbankan syariah berkembang pesat, namun pondok pesantren menghadapi kesenjangan dalam mengadopsi layanan keuangan digital untuk pengelolaan keuangan. Tujuan: Pengabdian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan transformasi digital perbankan syariah serta menganalisis tingkat literasi keuangan digital dalam pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun. Metode: Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Peserta pengabdian adalah pengurus pesantren, bendahara, santri, dan pengelola unit usaha pesantren yang dipilih secara purposif. Instrumen pengumpulan data berupa wawancara mendalam, kueslener literasi keuangan digital, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil utama: Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi menawarkan peluang peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan akses permodalan. Namun, berbagai tantangan signifikan ditemukan, yakni rendahnya literasi keuangan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, serta biaya awal implementasi yang relatif tinggi. Tingkat literasi keuangan digital peserta berada pada kategori rendah hingga sedang. Simpulan: Pengabdian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi keuangan pesantren sangat potensial tetapi memerlukan strategi transformatif berkelanjutan yang meliputi peningkatan edukasi dan literasi digital serta penguatan infrastruktur. Saran: Pengabdian selanjutnya direkomendasikan untuk mengembangkan model pendampingan berkelanjutan dan kurikulum literasi keuangan digital berbasis syariah untuk pesantren.

Keywords: transformasi digital, perbankan syariah, peluang dan tantangan, pengelolaan keuangan, pondok pesantren

Abstract

The digital transformation of Islamic banking is growing rapidly, but Islamic boarding schools face gaps in adopting digital financial services for financial management. Objective: This community service aims to identify opportunities and challenges for the digital transformation of Islamic banking and analyze the level of digital financial literacy in financial management at the Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun Islamic Boarding School. Method: The community service implementation method uses a qualitative approach with a case study design. The community service participants are Islamic boarding school administrators, treasurers, students, and Islamic boarding school business

unit managers who are selected purposively. Data collection instruments include in-depth interviews, a digital financial literacy questionnaire, observation, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Main results: The results show that digitalization offers opportunities for increasing efficiency, transparency, accountability, and access to capital. However, various significant challenges were found, namely low digital financial literacy, limited technological infrastructure, resistance to change, regulations that are not fully adaptive, and relatively high initial implementation costs. The level of digital financial literacy of participants is in the low to moderate category. Conclusion: This community service concludes that the digitalization of Islamic boarding school finances has great potential but requires a sustainable, transformative strategy that includes improving digital education and literacy, as well as strengthening infrastructure. Recommendation: Further community service is recommended to develop a sustainable mentoring model and a Sharia-based digital financial literacy curriculum for Islamic boarding schools.

Keywords: digital transformation, Islamic banking, opportunities and challenges, financial management, Islamic boarding schools

PENDAHULUAN

FAKTA SOSIAL

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Perbankan syariah di Indonesia tengah mengalami akselerasi transformasi digital yang sangat pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah nasional mencapai Rp967,33 triliun per Juni 2025, tumbuh 7,83 persen atau lebih tinggi dibandingkan aset perbankan nasional dan Konvensional. Bahkan, hingga Agustus 2025 aset perbankan syariah telah menyentuh Rp979 triliun dengan market share 7,44 persen. Pertumbuhan ini terjadi di tengah ketidakpastian global sekaligus membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendukung perekonomian domestik

Transformasi digital tidak hanya ditandai dengan meningkatnya penggunaan mobile banking dan transaksi elektronik, tetapi juga dengan munculnya beragam inovasi layanan keuangan digital berbasis syariah. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi pembayaran digital di Indonesia tumbuh lebih dari 30 persen pada awal 2025. Pengguna mobile banking syariah diproyeksikan meningkat drastis mencapai 27 juta pengguna dengan pertumbuhan sebesar 50 persen.

Bersamaan dengan itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dengan jumlah lebih dari 42 ribu pesantren menghadapi tantangan besar dalam modernisasi pengelolaan keuangannya. Sebagian besar pesantren masih mengelola keuangan secara manual dan belum optimal memanfaatkan layanan keuangan digital. Data terkini menunjukkan bahwa baru sekitar 34 persen dari keseluruhan pesantren di Indonesia yang bankable dan terintegrasi dengan layanan keuangan digital, sementara selebihnya masih sangat potensial untuk diberdayakan sebagai bagian dari ekosistem keuangan.

Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun, realitas yang teramati menunjukkan praktik pengelolaan keuangan yang masih bersifat manual. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran dilakukan dalam buku besar sederhana. Proses pembayaran biaya pendidikan santri dilakukan melalui transfer manual

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

atau setoran tunai yang rentan akan kesalahan pencatatan dan kurangnya transparansi kepada wali santri. Unit-unit usaha pesantren yang mulai berkembang masih mengelola keuangannya secara terpisah tanpa integrasi digital.

Paradoks yang terjadi adalah bahwa di satu sisi pesantren memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Pesantren dengan ratusan bahkan ribuan santri menciptakan ekosistem ekonomi tersendiri. Di beberapa tempat, pesantren mampu melahirkan koperasi dengan total aset kelolaan mencapai triliunan rupiah. Namun di sisi lain, keterbatasan akses dan pemahaman terhadap layanan keuangan digital justru menghambat optimalisasi potensi ekonomi tersebut. Pesantren yang tidak siap menghadapi transformasi digital akan mengalami kesulitan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan daya saing di era modern.

Selain itu, pesantren juga dihadapkan pada tuntutan untuk tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, termasuk dalam adopsi teknologi keuangan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi memberikan landasan hukum bagi digitalisasi keuangan syariah. Namun, implementasi fatwa ini di tingkat pesantren masih sangat terbatas karena rendahnya pemahaman pengurus pesantren terhadap regulasi tersebut.

Atas dasar fakta sosial tersebut, pengabdian kepada masyarakat ini dipandang sangat urgen untuk dilakukan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tentang transformasi digital perbankan syariah, tetapi juga mendorong implementasi nyata di pondok pesantren sehingga manfaat digitalisasi keuangan dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh pemangku kepentingan pesantren, mulai dari pengurus, santri, hingga wali santri.

FAKTA LITERATUR

Najwa Khairina (2025) dalam program pengabdian masyarakat yang bertajuk peningkatan literasi *fintech* di kalangan santri pesantren. Studi ini menggunakan metode *service learning* yang menggabungkan pendidikan teoretis dengan praktik langsung melalui lokakarya interaktif dan simulasi aplikasi *fintech*. Hasil program ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman santri tentang layanan keuangan digital, termasuk penggunaan dompet elektronik syariah, *peer-to-peer lending*, dan *crowdfunding*. Namun demikian, studi ini juga mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi, seperti terbatasnya infrastruktur digital dan masih adanya miskonsepsi tentang *fintech* di kalangan santri.

Lestari (2025) tentang pengaruh implementasi Digitren dan transaksi e-channel terhadap kualitas layanan keuangan pesantren. Penelitian kuantitatif ini menganalisis implementasi *Cash Management System* (CMS), layanan keuangan inklusif, dan transaksi e-channel di Yayasan Ma'had Islamy Kempeky. Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan

signifikan antara variabel *Cash Management System* (CMS) terhadap layanan keuangan pesantren dengan nilai signifikansi 0,510. Sebaliknya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel layanan keuangan inklusif terhadap layanan keuangan pesantren (sig 0,007) dan antara variabel transaksi e-channel terhadap layanan keuangan pesantren (sig 0,003).

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, persamaan dengan pengabdian ini adalah sama-sama menyoroti pentingnya digitalisasi keuangan di lingkungan pesantren serta sama-sama menggunakan pendekatan berbasis pemberdayaan dan edukasi kepada pemangku kepentingan pesantren. Perbedaan yang mendasar terletak pada fokus kajian. Penelitian pertama lebih menekankan pada aspek literasi *fintech* bagi santri secara umum, sedangkan penelitian kedua lebih terfokus pada pengaruh implementasi sistem digital tertentu terhadap kualitas layanan keuangan.

Novelty atau keterbaruan dalam pengabdian ini terletak pada tiga hal. *Pertama*, pengabdian ini secara spesifik membahas transformasi digital perbankan syariah dari perspektif peluang dan tantangan dalam konteks Pondok Pensantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun yang belum pernah dikaji sebelumnya. *Kedua*, pengabdian ini tidak hanya memberikan literasi keuangan digital tetapi juga melakukan pendampingan implementasi langsung dengan melibatkan seluruh ekosistem pesantren (pengurus, bendahara, santri, dan pengelola unit usaha). *Ketiga*, pengabdian ini mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah dalam setiap rekomendasi digitalisasi keuangan berdasarkan fatwa DSN-MUI yang relevan, sehingga memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

TUJUAN DAN RUMUSAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan digital pengurus pesantren, bendahara, santri, dan pengelola unit usaha di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun?
2. Apa saja peluang yang dapat dimanfaatkan dari transformasi digital perbankan syariah bagi pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan transformasi digital perbankan syariah pada pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun?

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat literasi keuangan digital pengurus pesantren, bendahara, santri, dan pengelola unit usaha di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun.
2. Mengidentifikasi peluang transformasi digital perbankan syariah yang dapat dioptimalkan untuk peningkatan pengelolaan keuangan pesantren.

3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi mitigasi dalam implementasi transformasi digital perbankan syariah di lingkungan pesantren.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun yang beralamat di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pemilihan lokasi pengabdian didasarkan pada identifikasi awal bahwa pondok pesantren ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan jumlah santri lebih dari 50 orang dan memiliki beberapa unit usaha pesantren yang sudah beroperasi, namun belum optimal dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

Waktu pelaksanaan pengabdian berlangsung selama tiga hari, terhitung mulai 03-06 April tahun 2026. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu: (1) tahap persiapan dan asesmen awal; (2) tahap pelaksanaan berupa edukasi, pelatihan, dan pendampingan; serta (3) tahap evaluasi dan penyusunan laporan.

Subjek penelitian atau khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah para pemangku kepentingan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan pesantren. Kriteria inklusi subjek meliputi: (a) pengurus pesantren yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan keuangan; (b) bendahara pesantren yang bertanggung jawab atas pengelolaan arus kas; (c) santri yang tergabung dalam pengelolaan unit usaha pesantren; serta (d) pengelola unit usaha pesantren (koperasi, kantin, atau usaha lain). Secara rinci, subjek pengabdian terdiri dari 5 orang pengurus pesantren, 3 orang bendahara pesantren, 10 orang santri pengelola unit usaha, dan 4 orang pengelola unit usaha pesantren, sehingga total subjek yang terlibat adalah 22 orang. Teknik pemilihan subjek yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa subjek-subjek tersebut memiliki pengetahuan, peran, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan pesantren sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan pengabdian.

Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus (*case study design*). Rancangan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena transformasi digital perbankan syariah dalam konteks spesifik pondok pesantren, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keunikan masing-masing pesantren.

Tahapan Pelaksanaan:

Tahap 1: Persiapan dan Asesmen Awal Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun untuk menyepakati jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim juga melakukan asesmen awal dengan menyebarkan kueslener literasi keuangan digital kepada seluruh subjek penelitian. Kuesioner ini dikembangkan berdasarkan indikator literasi

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

keuangan digital yang mencakup: (a) pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah; (b) pemahaman tentang aplikasi *mobile banking* dan transaksi digital; (c) pemahaman tentang keamanan bertransaksi digital; (d) pemahaman tentang prinsip syariah dalam transaksi digital; serta (e) frekuensi dan kenyamanan dalam menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, tim juga melakukan observasi awal terhadap sistem pengelolaan keuangan yang sedang berjalan di pesantren.

Tahap 2: Pelaksanaan Edukasi, Pelatihan, dan Pendampingan Tahap inti pengabdian ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. *Sosialisasi Transformasi Digital Perbankan Syariah* — Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendasar tentang konsep transformasi digital perbankan syariah, termasuk perkembangan terkini dan relevansinya dengan pengelolaan keuangan pesantren. Materi meliputi: pengertian dan urgensi transformasi digital, produk dan layanan perbankan digital syariah (*mobile banking*, QRIS, *e-wallet*, *cash management system*), serta fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang transaksi digital syariah.
2. *Pelatihan Literasi Keuangan Digital* — Pelatihan ini memberikan keterampilan praktis kepada peserta tentang cara menggunakan berbagai layanan keuangan digital syariah, termasuk pembukaan rekening digital, transaksi non-tunai, pembayaran tagihan, pengiriman uang, dan penggunaan QRIS untuk pembayaran di unit usaha pesantren. Pelatihan dilaksanakan dengan metode *hands-on practice* menggunakan perangkat digital yang telah disediakan.
3. *Workshop Pengelolaan Keuangan Digital bagi Bendahara* — Workshop khusus ini diselenggarakan bagi bendahara pesantren dengan fokus pada implementasi sistem pencatatan keuangan digital, rekonsiliasi transaksi otomatis, pembuatan laporan keuangan digital, serta integrasi antara rekening pesantren dengan aplikasi keuangan.
4. *Pendampingan Implementasi Langsung* — Setelah pelatihan selesai, tim pengabdian melakukan pendampingan intensif selama 2 minggu kepada peserta untuk membantu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan, konsultasi daring, serta monitoring berkala.

Tahap 3: Evaluasi dan Penyusunan Laporan (Minggu 11-12). Setelah seluruh kegiatan pelatihan dan pendampingan selesai, tim pengabdian melakukan evaluasi akhir dengan menyebarkan kembali kueslener literasi keuangan digital (*post-test*) untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Tim juga melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subjek terpilih untuk menggali lebih dalam tentang peluang, tantangan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disusun menjadi laporan akhir pengabdian.

Teknik Pengumpulan Data:

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi:

1. Kuesioner Literasi Keuangan Digital — Instrumen ini digunakan untuk mengukur tingkat literasi keuangan digital subjek penelitian pada tahap awal (*pre-test*) dan akhir (*post-test*). Kuesioner disusun dalam skala Likert 4 poin (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju) dengan jumlah pernyataan sebanyak 20 butir yang mencakup lima dimensi literasi keuangan digital sebagaimana disebutkan sebelumnya.
2. Wawancara Mendalam — Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan berdasarkan indikator peluang dan tantangan transformasi digital. Wawancara dilaksanakan kepada 8 orang informan kunci yang dipilih secara purposif dari 22 subjek penelitian, dengan durasi wawancara antara 45-60 menit per informan.
3. Observasi Partisipatif — Tim pengabdian melakukan observasi dengan turut serta dalam kegiatan operasional keuangan pesantren, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan pelatihan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan keuangan, kendala teknis yang dihadapi, serta perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan.
4. Dokumentasi — Data sekunder berupa dokumen-dokumen pesantren yang relevan dengan pengelolaan keuangan, seperti laporan keuangan, catatan transaksi, kebijakan internal, dan dokumentasi kegiatan, juga dikumpulkan untuk melengkapi data primer.

Teknik Analisis Data:

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk data kualitatif dan analisis statistik deskriptif untuk data kuantitatif dari hasil kuesioner.

Untuk data kuesioner, hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis dengan menghitung *gain score* (peningkatan skor) rata-rata setiap subjek dan setiap dimensi literasi. Peningkatan literasi dikategorikan menjadi tiga tingkatan: rendah (< 0,3), sedang (0,3-0,7), dan tinggi (> 0,7).

Untuk data wawancara mendalam dan observasi, analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah yang terkumpul dari wawancara dan observasi; (2) penyajian data, yakni penyusunan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk teks naratif, matriks, atau bagan untuk memudahkan penarikan kesimpulan; serta (3) penarikan kesimpulan, yakni verifikasi dan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Keabsahan data (*trustworthiness*) dalam pengabdian ini dijamin melalui empat kriteria, yaitu: (a) *credibility* (kredibilitas) yang dicapai melalui triangulasi sumber dan metode; (b) *transferability* (keteralihan) dengan menyediakan deskripsi yang rinci tentang konteks dan subjek pengabdian; (c) *dependability* (ketergantungan) dengan melakukan audit trail terhadap seluruh proses

pengabdian; serta (d) *confirmability* (kepastian) dengan memastikan bahwa temuan didasarkan pada data, bukan pada subjektivitas peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun merupakan pesantren yang memiliki kombinasi antara pendidikan agama tradisional dan sekolah formal dengan jumlah santri sekitar 50 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pesantren ini memiliki beberapa unit usaha yang sudah beroperasi, antara lain koperasi pesantren, kantin, percetakan, dan usaha pertanian terbatas.

Dari hasil observasi awal, ditemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan pesantren masih sepenuhnya manual. Seluruh transaksi pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku besar fisik yang dikelola oleh bendahara secara individu. Pembayaran biaya pendidikan santri dilakukan melalui transfer ke rekening bendahara atau setoran tunai langsung, yang kemudian dicatat satu per satu secara manual.

Tidak adanya sistem pencatatan yang terintegrasi mengakibatkan sering terjadi keterlambatan dalam rekonsiliasi transaksi, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Para pengurus pesantren juga mengakui bahwa mereka jarang mendapatkan laporan keuangan yang terstruktur secara periodik, sehingga pengambilan keputusan berbasis data keuangan menjadi sangat sulit dilakukan.

Tingkat Literasi Keuangan Digital Awal (Pre-Test)

Hasil kuesioner literasi keuangan digital (pre-test) yang diisi oleh 22 subjek pengabdian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan digital peserta secara umum berada pada kategori rendah hingga sedang. Rata-rata skor total peserta adalah 2,38 dari skala maksimal 4,00.

Tabel 1 berikut menyajikan distribusi skor literasi keuangan digital awal per dimensi:

Dimensi Literasi Keuangan Digital	Rata-rata Skor (Skala 1-4)	Kategori
Pemahaman produk & layanan perbankan syariah	2,85	Sedang
Pemahaman mobile banking & transaksi digital	2,12	Rendah
Pemahaman keamanan transaksi digital	1,96	Rendah
Pemahaman prinsip syariah dalam transaksi digital	2,40	Rendah
Frekuensi & kenyamanan penggunaan layanan digital	1,57	Rendah

Rata-rata Total	2,38	Rendah-Sedang

Sumber: Data primer, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dimensi "frekuensi dan kenyamanan penggunaan layanan digital" menempati posisi terendah dengan skor rata-rata hanya 1,57, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta masih jarang dan tidak nyaman menggunakan layanan keuangan digital. Dimensi "pemahaman keamanan transaksi digital" juga sangat rendah (1,96), menandakan bahwa peserta belum memiliki kesadaran yang memadai tentang risiko keamanan siber dalam bertransaksi digital. Hal ini merupakan temuan penting karena rendahnya pemahaman tentang keamanan siber dapat meningkatkan risiko kebocoran data pribadi dan penipuan digital di lingkungan pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para informan kunci dan observasi partisipatif, pengabdian ini berhasil mengidentifikasi beberapa peluang signifikan dari transformasi digital perbankan syariah bagi pengelolaan keuangan pondok pesantren. Secara sistematis, peluang-peluang tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas pengelolaan keuangan. Seluruh informan sepakat bahwa digitalisasi dapat secara drastis mengurangi waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk pencatatan transaksi manual. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu bendahara pesantren, "Selama ini saya menghabiskan setidaknya setengah hari setiap minggu hanya untuk merekap transaksi dan mencatatnya satu per satu di buku besar. Kadang terjadi selisih dan harus menghitung ulang dari awal. Kalau ada sistem digital, pekerjaan ini bisa selesai dalam hitungan menit" Potensi efisiensi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa implementasi sistem digital payment di pesantren dapat meningkatkan efektivitas transaksi dan mempermudah pengelolaan dana pesantren. 21 Penerapan warung BSI, QRIS BSI, dan BSI Agen yang difasilitasi oleh Bank Syariah Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana digitalisasi dapat mengintegrasikan unit usaha pesantren ke dalam ekosistem keuangan modern.

Kedua, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Digitalisasi keuangan memungkinkan setiap transaksi terekam secara otomatis dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang secara real-time. Seorang informan dari unsur pengurus pesantren mengemukakan, "Jika nanti sistemnya sudah digital, saya sebagai pimpinan bisa memantau langsung setiap hari bagaimana kondisi keuangan pesantren, berapa pemasukan dari SPP, berapa pengeluaran operasional, tanpa harus

menunggu laporan bulanan dari bendahara" Hal ini sangat krusial mengingat banyak pesantren yang masih kesulitan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel karena sistem pencatatan yang krodit (tidak teratur). Digitalisasi melalui aplikasi seperti Sitrendy dapat berfungsi sebagai payment gateway sekaligus alat kontrol yang menjamin kemudahan transfer bagi wali santri dan menghasilkan pencatatan transaksi yang teratur bagi pesantren.

Ketiga, penguatan akses permodalan dan pengembangan usaha pesantren. Dengan sistem keuangan yang terdigitalisasi dan terintegrasi, pesantren menjadi lebih bankable di mata lembaga keuangan syariah. Data menunjukkan bahwa saat ini baru sekitar 34% pesantren di Indonesia yang bankable dan terintegrasi dengan layanan keuangan digital.

Keempat, penguatan ekonomi syariah dan ekosistem halal nasional. Pesantren yang terdigitalisasi keuangannya berkontribusi pada terwujudnya ekosistem halal yang lebih kuat. Pesantren dengan ratusan bahkan ribuan santri merupakan ekosistem ekonomi tersendiri yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar telah berkomitmen untuk terus membangun *Islamic ecosystem* di Indonesia dengan pesantren sebagai salah satu pilar utamanya.

Tantangan Implementasi Transformasi Digital Perbankan Syariah

Tantangan utama yang muncul adalah rendahnya literasi keuangan digital di kalangan seluruh pemangku kepentingan pesantren. Sebagaimana telah ditunjukkan pada Tabel 1, rata-rata skor literasi sebelum pelatihan hanya 2,38 pada skala 1-4. Lebih spesifik, dimensi frekuensi dan kenyamanan penggunaan layanan digital hanya mencapai skor 1,57 (kategori sangat rendah).

Seorang informan mengakui: "Saya sebenarnya sudah punya rekening bank syariah dan aplikasi mobile banking-nya. Tapi saya tidak pernah berani melakukan transaksi selain cek saldo karena takut salah klik atau kena tipu. Lebih enak dan aman rasanya kalau ke bank langsung atau transfer via ATM". Pengakuan ini mencerminkan fenomena umum di mana adopsi teknologi digital tidak semata-mata soal akses melainkan soal keyakinan dan kenyamanan (*trust and comfort*).

Tantangan kedua adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Di lingkungan pesantren, ketersediaan perangkat digital seperti ponsel pintar dan akses internet yang stabil belum merata. Sebagian pengurus pesantren dan bendahara masih menggunakan ponsel dengan spesifikasi terbatas yang tidak mendukung aplikasi mobile banking versi terbaru. Koneksi internet di lokasi

pesantren yang berada di daerah dengan sinyal seluler terbatas juga menjadi kendala dalam melakukan transaksi daring yang memerlukan koneksi stabil.

Tantangan ketiga adalah resistensi terhadap perubahan dan mindset tradisional yang masih kuat di kalangan pengurus pesantren. Beberapa pengurus pesantren mengungkapkan kekhawatiran bahwa digitalisasi akan menghilangkan nilai-nilai tradisional pesantren. Seorang pengasuh pesantren menyatakan, "Kami khawatir jika semua transaksi sudah cashless, santri jadi lupa dengan nilai-nilai sederhana dan gotong royong yang selama ini kami tanamkan. Uang yang dipegang langsung secara fisik itu lebih berkesan dan lebih mengajarkan tanggung jawab"

Tantangan keempat adalah regulasi yang belum sepenuhnya adaptif dan biaya awal implementasi. Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang uang elektronik syariah, namun sosialisasi dan implementasinya di tingkat pesantren masih sangat terbatas. Selain itu, biaya awal untuk menyediakan perangkat digital (smartphone yang memadai, mesin EDC, atau smart card) serta biaya berlangganan aplikasi manajemen keuangan menjadi beban tambahan bagi pesantren yang umumnya memiliki keterbatasan anggaran.

Setelah mengikuti rangkaian kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan selama 8 minggu, tingkat literasi keuangan digital peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tabel 2 menyajikan perbandingan hasil pre-test dan post-test serta gain score untuk setiap dimensi literasi:

Dimensi Literasi Keuangan Digital	Pre-Test	Post-Test	Gain Score	Kategori Peningkatan
Pemahaman produk & layanan perbankan syariah	2,85	3,52	0,67	Sedang
Pemahaman mobile banking & transaksi digital	2,12	3,38	1,26	Tinggi
Pemahaman keamanan transaksi digital	1,96	3,30	1,34	Tinggi
Pemahaman prinsip syariah dalam transaksi digital	2,40	3,45	1,05	Tinggi
Frekuensi & kenyamanan penggunaan layanan digital	1,57	3,14	1,57	Tinggi
Rata-rata Total	2,38	3,36	0,98	Tinggi

Sumber: Data primer, diolah

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan literasi keuangan digital yang sangat signifikan dengan rata-rata gain score 0,98 (kategori tinggi). Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi "frekuensi dan kenyamanan penggunaan layanan digital" dengan lonjakan dari 1,57

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

menjadi 3,14, diikuti oleh dimensi "pemahaman keamanan transaksi digital" dan "pemahaman mobile banking dan transaksi digital"

Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang menggabungkan teori dan praktik langsung (*hands-on practice*) serta pendampingan intensif sangat efektif dalam meningkatkan literasi keuangan digital. Hasil ini sejalan dengan temuan studi digital literacy training di pesantren Mizanul Ulum yang juga melaporkan peningkatan yang sangat efektif dalam membangun budaya digital yang aman, etis, dan bertanggung jawab di lingkungan pesantren.

Pembahasan

Temuan pengabdian ini memperkuat argumentasi bahwa digitalisasi keuangan pesantren bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak di era transformasi digital. Rendahnya literasi keuangan digital awal peserta (rata-rata 2,38) mencerminkan realitas yang lebih luas di kalangan pesantren Indonesia. Hal ini mengonfirmasi apa yang diungkapkan oleh Asep Januarsyah, Ketua LAZISNU Kabupaten Bandung, bahwa banyak pesantren masih menghadapi permasalahan pencatatan keuangan yang manual dan rentan ketidakakuratan.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil asesmen OJK yang menyebutkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih terbatas, dan hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah Rendahnya literasi ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum tetapi juga pada pengelola lembaga pendidikan Islam seperti pesantren.

Peningkatan literasi yang sangat signifikan pasca-pelatihan (gain score 0,98 atau kategori tinggi) memberikan implikasi penting bahwa intervensi edukasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dapat mempercepat adopsi teknologi keuangan digital di lingkungan pesantren. Namun demikian, peningkatan literasi saja tidak cukup. Diperlukan infrastruktur pendukung dan kebijakan yang memudahkan pesantren dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan digital.

Komitmen Bank Syariah Indonesia yang telah mengelola sekitar 12.000 pesantren di seluruh Indonesia dan menyediakan warung BSI, QRIS BSI, serta BSI Agen merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi. Namun angka 12.000 pesantren dari total lebih dari 42.000 pesantren di Indonesia (sekitar 28,6%) masih menyisakan ruang yang sangat besar untuk perluasan jangkauan.

Tantangan regulasi juga perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun telah ada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, implementasinya di tingkat

pesantren masih minim. Diperlukan sosialisasi fatwa ini secara masif kepada pengurus pesantren agar mereka memiliki pemahaman yang benar bahwa transaksi digital tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama memenuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan. Fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi umat Islam bahwa penggunaan uang elektronik mengikuti prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan transaksi haram.

Aspek keamanan siber juga menjadi perhatian penting. Peningkatan pemahaman tentang keamanan transaksi digital dari 1,96 menjadi 3,30 pasca-pelatihan menunjukkan bahwa peserta awalnya sangat awam tentang risiko-risiko digital seperti phishing, malware, penipuan digital, dan pencurian identitas. Namun setelah diberikan pemahaman, kesadaran mereka meningkat secara signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya memasukkan materi keamanan siber dalam setiap program literasi keuangan digital di pesantren.

Terakhir, temuan tentang resistensi terhadap perubahan yang didasari kekhawatiran hilangnya nilai-nilai tradisional pesantren perlu disikapi secara bijak. Transformasi digital tidak berarti meniadakan semua nilai tradisional, melainkan mengintegrasikan teknologi dengan kearifan lokal pesantren. Seperti yang diusulkan dalam kerangka transformasi digital pesantren, pendekatan bertahap yang tetap mengedepankan kepatuhan syariah dan nilai-nilai pesantren harus menjadi panduan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Syihabuddin Bin Ma'mun, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Pertama, tingkat literasi keuangan digital awal peserta pengabdian berada pada kategori rendah hingga sedang dengan rata-rata skor 2,38 dari skala 4,00. Dimensi terendah terdapat pada frekuensi dan kenyamanan penggunaan layanan digital (1,57) serta pemahaman keamanan transaksi digital (1,96). Namun setelah mengikuti rangkaian pelatihan dan pendampingan selama 8 minggu, terjadi peningkatan yang signifikan dengan rata-rata *gain score* 0,98 (kategori tinggi). Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi frekuensi dan kenyamanan penggunaan layanan digital yang diikuti oleh pemahaman keamanan transaksi digital

Kedua, pengabdian ini berhasil mengidentifikasi empat peluang utama transformasi digital perbankan syariah bagi pengelolaan keuangan pesantren, yaitu: (a) peningkatan efisiensi dan

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

produktivitas pengelolaan keuangan melalui otomatisasi pencatatan transaksi; (b) transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik melalui sistem pencatatan *real-time* yang terintegrasi; (c) penguatan akses permodalan dan pengembangan usaha pesantren karena sistem keuangan yang digital memudahkan pesantren menjadi lebih *bankable*; serta (d) penguatan ekonomi syariah dan ekosistem halal nasional dengan pesantren sebagai pilar utama.

Ketiga, pengabdian ini juga mengidentifikasi lima tantangan utama, yaitu: (1) rendahnya literasi keuangan digital di kalangan seluruh pemangku kepentingan pesantren; (2) keterbatasan infrastruktur teknologi (perangkat dan akses internet); (3) resistensi terhadap perubahan dan kekhawatiran hilangnya nilai-nilai tradisional pesantren; (4) regulasi yang belum sepenuhnya adaptif dan sosialisasi fatwa DSN-MUI yang masih minim; serta (5) biaya awal implementasi yang relatif tinggi bagi pesantren.

SARAN

Pertama, disarankan agar pelatihan literasi keuangan digital diberikan secara berjenjang dan berkelanjutan, tidak hanya bersifat satu kali namun diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren secara periodik. Hal ini penting untuk memastikan peningkatan literasi yang telah dicapai tidak mengalami penurunan seiring waktu. Program pelatihan dapat dimulai dengan tingkat dasar untuk seluruh santri, kemudian tingkat lanjutan untuk pengurus dan bendahara, dan tingkat mahir untuk pengelola unit usaha pesantren.

Kedua, perlu dilakukan pendampingan teknis yang lebih intensif dan jangka panjang (minimal 6 bulan) untuk membantu pesantren dalam transisi dari sistem manual ke sistem digital. Pendampingan dapat dilakukan melalui kombinasi kunjungan lapangan berkala (setiap 2 minggu) dan konsultasi daring yang dapat diakses kapan saja. Bentuk pendampingan dapat mencakup bantuan teknis pengoperasian aplikasi, bantuan rekonsiliasi data, serta penyusunan laporan keuangan digital.

Ketiga, disarankan untuk mengembangkan modul pelatihan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mencakup cara menggunakan aplikasi perbankan digital, tetapi juga aspek-aspek penting lainnya seperti: manajemen keuangan dasar, etika bertransaksi digital dalam Islam, serta literasi hukum terkait transaksi digital dan perlindungan konsumen. Modul ini sebaiknya disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan ilustrasi serta contoh kasus yang relevan dengan konteks pesantren.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

Keempat, pengabdian selanjutnya disarankan untuk melibatkan perbankan syariah sebagai mitra implementasi, bukan hanya sebagai narasumber. Kolaborasi dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan perangkat pendukung digital (*smartphone*, mesin EDC, atau *smart card*) secara subsidi, pembebasan biaya administrasi untuk rekening pesantren, serta penyediaan layanan *customer support* khusus untuk pesantren. Bentuk kemitraan seperti ini telah terbukti berhasil dalam program digitalisasi di Pondok Pesantren Wali Barokah bersama BSI, di mana pesantren mendapatkan fasilitasi *smart card* untuk 4.000 santrinya.

Kelima, disarankan untuk melakukan riset lanjutan yang bersifat kuantitatif eksperimental untuk mengukur secara lebih akurat dampak digitalisasi keuangan terhadap berbagai indikator kinerja pesantren, seperti efisiensi biaya operasional, kepuasan wali santri, tingkat akurasi laporan keuangan, serta pertumbuhan ekonomi unit usaha pesantren. Hasil riset semacam ini akan sangat bermanfaat untuk menyusun *business case* yang meyakinkan bagi pesantren lain yang masih ragu untuk memulai digitalisasi keuangannya.

Keenam, bagi pengelola pesantren dan pemangku kebijakan, disarankan untuk membentuk tim khusus digitalisasi pesantren di tingkat pengurus yang bertugas merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi transformasi digital secara bertahap. Tim ini idealnya terdiri dari unsur pimpinan pesantren, bendahara, perwakilan santri, dan pendamping teknis dari perguruan tinggi atau lembaga keuangan syariah. Adanya tim khusus akan memastikan bahwa digitalisasi berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

DAFTAR PUSTAKA

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Statistik Perbankan Syariah – September 2025. Jakarta: Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Perbankan Syariah Menggeliat: Aset Sentuh Rp967 Triliun, Momentum Emas Ekonomi Halal. Jakarta: OJK Press Release, 3 September 2025.

Halal Invest. (2025). Bank Syariah 2025: Konsolidasi, Digitalisasi & Proyeksi Terkini. Jakarta: Halal Invest Publishing, 3 Juli 2025.

Bank Indonesia. (2025). Statistik Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Jakarta: Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Indonesia Business Times. (2025). Digitalisasi Dorong Inklusi dan Pertumbuhan Perbankan Syariah. Jakarta: Indonesian Business Times, 11 November 2025.

BCA Sekuritas. (2025). BSI Berkomitmen Perkuat Penetrasi Digital Ekosistem Pesantren. Jakarta: BCA Sekuritas, 13 Oktober 2025.

Lestari, M. T. (2025). Pengaruh Implementasi Digitren dan Transaksi E-Channel Terhadap Kualitas Layanan Keuangan Pesantren (Studi Kasus di Yayasan Ma'had Islamy Kempeky). [Tesis Magister]. Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati.

LAZISNU Kabupaten Bandung. (2025). Canangkan Digitalisasi Keuangan Pesantren, LAZISNU Bandung Jajaki Kerjasama dengan Tel-U Hadirkan Sitrendy. Bandung: NU Online Jabar, 13 November 2025.

Bank Syariah Indonesia. (2025). BSI Siapkan Strategi Penguatan Layanan Digital Pesantren. Jakarta: BSI Press Release, 13 Oktober 2025.

Khairina, N. (2025). Peningkatan Literasi Fintech di Kalangan Santri Pesantren: Program Pengabdian Masyarakat. GARUDA (Garba Rujukan Digital). Jakarta: Kemdiktisaintek RI.

Islamiyah, M. (2025). A Digital Transformation Framework for Pesantren: Integrating Technology and Sharia Principles in Startup Development. Serambi: Fiqh Journal, 1(2).

Alwi, E. I., & Jasmaniar. (2025). Optimalisasi Literasi Digital untuk Keamanan Privasi pada Guru dan Siswa Pesantren Mizanul Ulum Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. Yogyakarta: Jurnal Pengabdian UGM, November 2025.

Ramadhan, W., Budianti, Y., & Farabi, M. A. (2025). Integrating Information Literacy into Islamic Boarding School Curriculum: A Study at Ibadurrahman Pesantren at Stabat. Medan: Jurnal UIN Sumatera Utara, November 2025.

e-ISSN 3025-6143 Vol 4. No. 1 Juni 2026
hal. 1-16

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Syariah). Jakarta: DSN-MUI.

Kemdiktisaintek RI. (2024). Pondok Pesantren Wali Barokah Digitalisasi 4.000 Santri. Jakarta: ANTARA News Megapolitan, 8 Maret 2024.

Akhmad, M. F. (2026). Halal Bihalal RMI PWNU Jateng: Momentum Transformasi Digital Pesantren. Sragen: Risalah NU Online, 13 April 2026.

Politeknik Negeri Jember. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung 2 Berbasis Web dan Mobile. Jember: Jurnal Polije.

Puskas BAZNAS. (2020). Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pembiayaan dan Pendampingan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Lampung: IAIN Metro Repository.